

Ribuan E-KTP Invalid Dimusnahkan

KEBUMEN (KR) - Sedikitnya 36.000 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) invalid dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen. Pemusnahan dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan e-KTP invalid untuk kepentingan yang tidak dibenarkan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Kebumen, Anna Ratnawati, memastikan pemusnahan e-KTP invalid tidak ada pihak yang dirugikan. Pasalnya, pemusnahan dilakukan sesuai prosedur. "Pemusnahan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, agar tertib penyimpanan dan pengamanan Blangko e-KTP, serta untuk mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan e-KTP invalid," terang Anna, Selasa (17/1).

Anna menuturkan, e-KTP invalid dikumpulkan dari KTP rusak (gagal cetak), gagal encode, atau ada perubahan elemen data dalam proses pelayanan, seperti perubahan status dari belum kawin menjadi sudah kawin, atau pindah tempat tinggal. Pemusnahan e-KTP invalid dikatakan akan terus dilakukan karena e-KTP invalid akan terus ada seiring masih adanya layanan. "Dalam sehari saja, Disdukcapil Kabupaten Kebumen mencetak hampir 500 e-KTP baik baru, maupun pembaharuan data. Pemusnahan e-KTP invalid untuk menghindari penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab," tandas Anna. **(Suk)-f**

KPU Temanggung Wawancara Pendaftar PPS

TEMANGGUNG (KR) - Sebanyak 1.909 calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjalani tes wawancara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung. Pada tes wawancara ini KPU melimpahkan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ketua KPU Kabupaten Temanggung Muhammad Yusuf Hasyim mengatakan wawancara ditugaskan pada PPK, sebab tidak memungkinkan KPU langsung melakukan wawancara pada 1.909 pendaftar yang lolos tes tertulis. "Kami dari KPU sebagai supervisi dalam wawancara calon PPS," kata Muhammad Yusuf Hasyim, Rabu (18/1).

Disampaikan sesuai undang-undang memang KPU yang membentuk PPS. Tetapi dalam pelaksanaan pembentukan seperti tes tertulis dan wawancara bisa dilakukan atau menugaskan PPK. Pada pembentukan PPS periode ini PPK ditugaskan dalam kegiatan tes tertulis dan koreksi hasil tes tertulis calon anggota PPS. Selain itu tes wawancara, rekapitulasi nilai hasil testertulis dan wawancara. "PPK juga medapat tuhhas dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan tes tertulis dan wawancara pembenyukkan PPS," katanya.

Muhammad Yusuf Hasyim mengatakan tes wawancara PPS dilakukan di masing-masing kecamatan mulai pukul 08.00 hingga selesai. Pelaksanaan mulai mulai 18-20 Januari 2023. Dikatakan, selain berlokasi di masing-masing kecamatan, tes wawancara akan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebelumnya, sejumlah PPK telah diberi bekal bagaimana mekanisme melakukan tes wawancara.

Berbagai materi ditanyakan pada wawancara itu. Di antaranya kepemilikan, komitmen dan rekam jejak atau masukan dari masyarakat. "Kami memerlukan komitmen dan rekam jejak. Nilainya akan dipadukan dengan nilai tes tulisnya, sehingga keputusan lolos dan tidak lolos nanti tetap keputusan pleno KPU," katanya. **(Osy)-f**



KR-Zaini Arrosyid

KPU Temanggung wawancara 1.909 pendaftar PPS.

Satpol PP-Disdikbud Sukoharjo Pantau Pedagang Chikibul

SUKOHARJO (KR) - Pedagang Chikibul belum ditemukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut berdasarkan pemantauan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo. Namun demikian, pengawasan ketat perlu dilakukan oleh semua pihak termasuk orangtua terhadap makanan jajanan yang dibeli anak.

Kepala Satpol PP sekaligus Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Disdikbud Sukoharjo Heru Indarjo, Selasa (17/1) mengatakan, pemantauan sudah dilakukan Satpol PP dan Disdikbud Sukoharjo terkait keberadaan pedagang Chikibul. Petugas diterjunkan memantau langsung kondisi di wilayah maupun lingkungan sekolah. Hasilnya sementara tidak ditemukan adanya aktivitas perdagangan chikibul.

Heru menjelaskan, Satpol PP Sukoharjo menerjunkan petugas berpatri wilayah dengan sasaran pusat keramaian seperti di pasar tradisional, perbelanjaan modern, dan kawasan perdagangan lainnya. Petugas melihat secara langsung pedagang dan jenis makanan yang dijual. Selain itu, petugas juga berinteraksi dengan pedagang sekaligus memberikan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan nitrogen cair pada makanan atau chikibul.

Hal sama juga dilakukan Disdikbud Sukoharjo dengan melibatkan kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah dengan sasaran pemantauan Chikibul. Pemantauan dilakukan di dalam sekolah meliputi kantin dan koperasi. Selain itu guru juga memantau pedagang di lingkungan luar sekolah. Hasilnya tidak ditemukan adanya pedagang Chikibul. Pihak sekolah setelah mengetahui bahaya chikibul langsung memberikan sosialisasi dan edukasi kepada siswa dan orang tua. Selain itu, pengawasan ketat juga masih dilakukan guru terhadap makanan jajanan yang dibeli siswa.

"Untuk di sekolah aman. Sebab siswa sekarang rata-rata sudah membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Selain itu pihak sekolah juga menyediakan jajanan sehat di kantin di dalam lingkungan sekolah. Itu untuk menjaga kesehatan bersama apalagi setelah sebelumnya ada pandemi virus Corona dan sekarang muncul jajanan Chikibul," ujarnya. Heru menegaskan, meski aman namun pihaknya meminta kepada semua pihak untuk membantu pengawasan bersama. **(Mam)-f**

Baznas Klaten Himpun ZIS Rp 6 Miliar

KLATEN (KR) - Tahun 2022, Baznas Klaten berhasil menghimpun zakat infak dan sedekah (ZIS) Rp 6 miliar lebih. Terjadi kenaikan signifikan dibanding tahun 2021 yang jumlahnya sekitar Rp 4,8 miliar.

Hal itu dipaparkan H Rantiman, Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Klaten saat acara menempati kantor baru Baznas, Selasa (17/1). Baznas Klaten pindah kantor, yang semula menumpang di Masjid Raya Klaten, kini menempati bekas gedung Dinsos P3APPKB, di Jalan Ronggowarsito, Bareng Lor, Klaten Utara.

H Rantiman, menyampaikan perkembangan Baznas Kabupaten Klaten. Sekitar tahun 2006, seolah-olah hanya milik Kemenag. Pada tahun 2006 hingga tahun 2008, pemasukan per bulan hanya sekitar Rp 50 juta, dan dari jumlah tersebut sebesar Rp Rp 35 juta dari Kemenag. Yang lainnya, termasuk ASN se Kabupaten Klaten dan masyarakat, kadang berkisar Rp 10 juta dan paling tinggi Rp 15 juta.

"Ini awal mula. Setelah beberapa tahun kemudian apalagi terbitnya UU No. 23 Tahun 2011, alhamdulillah pionir kita bertambah. Yakni bapak-bapak pengurus Yayasan Jamaah Haji. Ini pionir kedua setelah jajaran Kemenag," kata Rantiman.

Pada tahun pertama melaksanakan UU No. 23 tahun 2011, langsung dua lembaga besar di Klaten tersebut semuanya telah menyerahkan hasil resminya, zakat, infak, dan sedekah sebesar 2,5 persen tanpa hitungan nisab. Tahun 2021 Baznas Klaten bisa mengumpulkan Rp 4, 8 miliar, tetapi itu semua dari lembaga inti pionir sebesar Rp 3,5 miliar.

Sisanya dari ASN lengkap, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal. Untuk dua lembaga besar tersebut, diberikan prioritas untuk pendistribusian sebesar 70 persen, dan yang 30 persen pendistribusian oleh Baznas.

Tahun 2022, secara keseluruhan, termasuk infak Ramadhan bisa mencapai Rp 6 miliar lebih, berarti

terjadi kenaikan cukup signifikan. Salah satu faktor, karena ada sumber dari person mencapai Rp 400 juta. Rantiman mewakili Baznas Klaten mengucapkan terimakasih pada jajaran Takmir Masjid Raya Klaten yang selama ini telah memfasilitasi kantor sementara dan segala keperluan Baznas.

Asisten Pemerintahan Setda Klaten

Jaka Purwanto mewakili Bupati mengemukakan, dengan kantor baru diharapkan bisa meningkatkan semangat pelayanan baznas pada masyarakat.

Baznas Klaten harus bisa memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia pada umumnya dan di Klaten pada khususnya. **(Sit)-f**



KR-Sri Warsiti

Upacara menempati kantor baru Baznas Klaten.

Polres Boyolali Berlakukakan Lagi Tilang Manual

BOYOLALI (KR) - Satuan Lalulintas (Satlantias) Polres Boyolali memberlakukan kembali sistem tilang secara manual mulai akhir Januari 2023. Tilang manual diklaim lebih efektif untuk menindak para pelanggar lalulintas.

Kasat Lantas Polres Boyolali AKP M Herdi Pratama, mengatakan, diberlakukannya kembali tilang manual menindaklanjuti perintah Dirlantas. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalulintas.

"Terkait tilang manual, jadi ini sudah menjadi perintah dari bapak Dirlantas sendiri, menyampaikan kepada seluruh kasatlantas di jajaran Polda Jateng," ujarnya, Rabu (18/1).

Menurutnya, tilang manual diberlakukan sebagai bentuk respon atas keinginan dari masyarakat. Hal ini karena tingginya angka kecelakaan lalulintas serta semakin menurunnya kepatuhan pengendara dalam berlalulintas.

"Sebenarnya tilang elektronik

sudah dijalankan, termasuk tilang menggunakan drone. Namun dikarenakan dari masyarakat ingin meminta kembali tilang manual dilakukan, karena dilihat angka kecelakaan lumayan tinggi, kemudian angka kepatuhan masyarakat menjadi menurun terutama kepatuhan menggunakan septy pribadi seperti bel, paka helm, dan lain sebagainya," kata Herdi.

Herdi menyampaikan, pelanggaran kasat mata lainnya yang mengganggu ketertiban masyarakat seperti misalnya knalpot brong yang jika ditilang melalui elektronik kurang maksimal. Sehingga penting memadukan antara tilang elektronik dan tilang manual.



KR-Mulyawan

AKP M Herdi Pratama

Rencananya, tilang manual akan resmi diberlakukan pada akhir Januari 2023. Saat ini Satlantias masih sosialisasi kepada masyarakat. Kendaraan yang menjadi sasaran tilang manual adalah pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong, kendaraan over dimensi, kendaraan muatan berlebih atau over load, termasuk kendaraan tak berplat nomor, dan

pelanggaran lainnya.

"Untuk sementara kita masih tahap sosialisasi penyampaian kepada masyarakat terlebih dahulu dan juga kami baru menginfokan melalui sosial media kami dan itu juga ada beberapa kehebohan di masyarakat dan itu wajar karena masyarakat sudah terbiasa dengan tilang elektronik, kenapa kembali lagi ke tilang manual," katanya.

Menurut Herdi, tilang manual bukan berarti bentuk kemunduran. Tilang manual hanya untuk memadukan agar lebih komprehensif. Sebab, jika hanya menggunakan tilang elektronik tidak bisa menjangkau semua bentuk pelanggaran lalulintas.

"Nah, terus juga kami sebenarnya bukan bahagia atau bangga bisa menilai lagi masyarakat Boyolali. Justru kami ini pinginnya malahan kalau bisa masyarakat tidak perlu ditilang tapi sudah tertib lalulintas, begitu," ungkapnya. **(R-3)-f**

Khitanan Sambut Hari Jadi Baznas

KARANGANYAR (KR) - HUT ke-22 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Karanganyar memberi kebahagiaan 17 anak yatim dan yatim piatu. Mereka dikhitan secara cuma-cuma dan mendapat tas sekolah. "Ada 17 anak yatim atau yatim piatu. Masing-masing 1 anak dari 17 kecamatan. Khitan ini disponsori Baznas dan JNE," kata Ketua Baznas Karanganyar KH Khafizi kepada wartawan usai tasyakuran hari jadi ke-22 Baznas, Selasa (17/1).

Belasan anak tersebut diantar walinya ke lokasi tasyakuran. Rencananya, khitan dilaksanakan di klinik Baznas di kawasan Buksiwah. Usai dikhitan, tiap anak diberi bantuan dana kontrol pasca khitan Rp500 ribu dari Baznas. Selain itu, JNE memberikan bantuan uang saku Rp100 ribu, tas sekolah, sarung, baju taqwa dan kopiah.

Khafizi mengapresiasi seluruh donatur yang terus mendonasikan dana umat melalui zakat, infak dan sedekahnya. Pada tahun ini, ZIS ditarget Rp22,8 miliar. Baznas memperluas penarikannya ke ka-

langan ASN dari TNI, Polri dan pegawai perusahaan. Selama ini, potensi penarikan ZIS dari ASN Pemkab dan pegawai perusahaan milik pemerintah daerah. "Tahun 2022 lalu, perolehan ZIS Baznas Karanganyar mencapai Rp 21,650 miliar. Naik Rp 550 juta dari perolehan tahun 2021 yang sebesar Rp 21,1 miliar," katanya.

Sementara itu, dalam peringatan HUT ke-22, Baznas Karanganyar menggelar berbagai acara. Di antaranya khataman Alquran oleh pimpinan, staf dan mahasiswa penerima beasiswa, khitanan massal diikuti 17 anak, santunan kepada 17 anak yatim. Kemudian pentasharufan ZIS, di antaranya untuk Program Karanganyar Cerdas berupa bantuan prasarana tempat ibadah institusi pendidikan sebesar Rp 395,5 juta, bantuan beasiswa pendidikan lewat LGNOTA Karanganyar Rp 420 juta. Lalu bantuan RTLH Rp 10 juta, bantuan sosial Rp 12,750 juta, program pengadaan air bersih di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat Rp 30 juta, serta bantuan kursi roda. **(Lim)-f**

Pompa Motivasi Melalui Publikasi

SALATIGA (KR) - Staf dan insan Penerangan Korem (Penrem) 073 Makutarama dipompa semangat untuk bekerja lebih baik dalam hal publikasi. Pembangunan semangat ini diwujudkan dengan evaluasi kerja yang dilakukan Kepala Penerangan Korem 073 MKT Salatiga, Mayor Masrokan, Rabu (18/1). Menurut Masrokan, Penerangan Korem 073 selalu mengadakan evaluasi kerja terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. "Terima kasih Anda sekalian telah bekerja dengan semangat, tulus dan ikhlas, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas. Mari evaluasi bersama mana yang kurang diperbaiki," tegas Masrokan.

Tujuan diadakan evaluasi kerja ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun 2022, sehingga Penrem 073 MKT dapat memperbaiki dan meminimalisir kelemahan dan kekurangan tersebut pada kegiatan yang akan datang. Paurprod Penrem 073/Makutarama, Salatiga, Letda Abdul Wahab menambahkan, evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan ini menjadi tolok ukur, baik bersifat internal maupun kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok publikasi ke eksternal. "Harga diri suatu keberhasilan adalah kerja keras, pengabdian untuk menggapai sukses dengan persiapan yang matang dan mau belajar dengan penuh ketekunan," kata Abdul Wahab. **(Sus)-f**

Pimpinan DPRD Klaten Sampaikan Laporan Kinerja

KLATEN (KR) - Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengemukakan, Selama tahun 2022 DPRD Kabupaten Klaten menerima tamu luar daerah sebanyak 195 kali. Hal ini dikatakan Hamenang saat menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Klaten tahun 2022, pada rapat paripurna, Senin (16/1).

Hamenang memaparkan, realisasi pelaksanaan kegiatan rapat pimpinan DPRD terealisasi sebanyak 6 kali. Rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi DPRD teralisasi 11 kali. Rapat Badan Musyawarah 12 kali, rapat Badan Anggaran 18 kali, rapat badan pembentukan peraturan daerah 6 kali, rapat komisi-komisi DPRD 71 kali, rapat pimpinan DPRD dan pimpinan komisi DPRD 11 kali, rapat panitia khusus atau

gabungan komisi 26 kali, rapat badan kehormatan 6 kali, rapat paripurna 28 kali, seminar/workshop atau bintek 6 kali, serap aspirasi atau reses DPRD 3 kali.

Pada tahun 2022 DPRD Klaten belum memiliki Raperda inisiatif. Jumlah gabungan komisi yang dibentuk 4 kali, jumlah Pansus yang dibentuk sebanyak 4 Pansus, audiensi/ekspose/LSm hearing 19 kali, menerima kunjungan kerja tamu dari luar daerah sebanyak 195 kali,

Dalam fungsi pembentukan Perda selama tahun 2022 telah menghasilkan beberapa produk hukum. Diantaranya ada 14, produk hukum DPRD berupa keputusan DPRD sebanyak 31 keputusan, produk hukum berupa keputusan pimpinan DPRD sebanyak 3 keputusan.

Dalam hal fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Klaten menyusun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Klaten dalam rangka penyusunan RKPD kabupaten Klaten tahun 2023.

Selanjutnya membahas dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Bersama-sama dengan kepala daerah membahas dan menyetujui KUPA dan PPAS APBD Perubahan tahun 2022, dan KUA dan PPAS APBD tahun 2023 serta RAPBD tahun 2023.

Selain itu, juga menyampaikan laporan hasil rapat Badan Anggaran yang disampaikan pada alat kelengkapan DPRD maupun kepala daerah, dalam bentuk pendapat Badan Anggaran. Dalam fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Klaten te-

lah melaksanakan kegiatan antara lain, pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan keputusan kepala daerah, dan pengawasan pelaksanaan APBD. Selain itu, juga pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi pengawasan dilakukan DPRD melalui alat kelengkapan DPRD

dengan melakukan monitoring, kunjungan kerja, rapat kerja baik dengan eksekutif dan stakeholder, rapat dengar pendapat, serta menerima pengaduan masyarakat. Alat kelengkapan yang dimaksud adalah komisi-komisi DPRD Kabupaten Klaten sesuai dengan bidang tugas masing-masing," kata Hamenang Wajar Ismoyo. **(Sit)-f**



KR-Sri Warsiti

Hamenang Wajar Ismoyo saat menyampaikan laporan kinerja.